

274

Dokumen



RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

- I. SIDANG PARA MENLU ASEAN
 - D. Masalah Keamanan
- II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN
 - A. Perkembangan Ekonomi ASEAN
 - B. Kerjasama Perbankan
 - IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIA-LOG
 - A. Pertemuan ASEAN dengan mitra dialognya (PMC)
 - B. Hubungan ASEAN-Jepang
 - C. Hubungan ASEAN-Uni Soviet
 - D. Hubungan ASEAN - Asia-Pasifik
 - Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-2
- III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN
 - A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
 - 1. Persahabatan CAJ-NSK
 - 2. Kongres Pustakawan ASEAN ke-8
 - B. Kerjasama Kesehatan
 - Konferensi Kesehatan ASEAN ke-1
 - C. Kerjasama Lingkungan Hidup
 - Pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan Hidup ASEAN ke-3
 - V. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA
 - Masalah Sikap AS tentang Kamboja



I. SIDANG PARA MENLU ASEAN

Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-23 berlangsung di Jakarta tanggal 24-25 Juli 1990 untuk membahas: (1) kerjasama ASEAN di berbagai bidang atau komite dalam satu tahun terakhir; (2) masalah Kamboja, pengungsi Indocina dan hal-hal lain yang menjadi sorotan ASEAN; (3) strategi ASEAN dalam menghadapi pertemuan peninjauan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang kedua di Singapura. Dalam pertemuan ini untuk pertama kalinya Sekretariat ASEAN akan memiliki Deputy Sekjen yang berasal dari Singapura (*Kompas*, 24-7-1990).

Menlu Ali Alatas sebagai Ketua Panitia Tetap ASEAN mengatakan kepada Suara Pembaruan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) posisi Indonesia bersama ASEAN selama ini menyangsikan apakah langkah yang diambil AS untuk mengosongkan kursi keanggotaan CGDK di PBB akan membantu dan mengarah pada penyelesaian yang dapat diterima semua sebagai penyelesaian; (2) langkah yang diambil AS akan dibicarakan pada konperensi tahunan para Menlu ASEAN ke-23; (3) Indonesia bersama ASEAN tidak keberatan AS membuka dialog dengan Vietnam maupun Hun Sen (*Suara Pembaruan*, 19-7-1990).

Sementara itu dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI tanggal 18 Juli 1990, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) ada kekenduran yang terjadi di dalam upaya mencari penyelesaian politik secara damai dan menyeluruh atas konflik Kamboja dan hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena hanya akan merugikan proses perdamaian konflik Kamboja dan rakyat Kamboja; (2) sebagai Ketua Bersama ICK, Indonesia dan Perancis terpenggil untuk tetap melanjutkan dan menggiatkan upaya penyelesaian konflik tanpa mengabaikan realitas yang ada; (3) hasil pertemuan Dewan Keamanan PBB ke-5 di Paris serta Pertemuan Tahunan Menlu ASEAN (AMM) dan Pertemuan Menlu ASEAN dengan Negara Mitra Dialog (PMC) akan diusahakan untuk menentukan langkah konkrit bagi penyelesaian masalah Kamboja (*Kompas*, 19-7-1990).

Dalam Konperensi Pers tanggal 20 Juli 1990 di Jakarta, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) Pertemuan Para Menlu ASEAN ke-23 yang akan dibuka Presiden Soeharto tanggal 24 Juli 1990 di Istana Merdeka, untuk pertama kalinya akan dihadiri oleh para Menteri

Bidang Ekonomi ASEAN dan dari Indonesia yang hadir adalah Menteri Perdagangan Arifin Siregar serta Menteri Perindustrian Hartarto; (2) delegasi MEE ke AMM saat ini terdiri atas ketua, sekarang Italia, Ketua MEE yang baru diganti (Irlandia) dan ketua yang akan datang (Luxemburg) ditambah dengan komisioner yang menangani hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik dan Amerika Latin; (3) Post Ministerial Consult (PMC) akan meliputi sidang pleno antara 6 anggota ASEAN dengan 6 mitra wicaranya (6+6), disusul pertemuan ASEAN dengan 5 mitra wicaranya dari Pasifik yang dihadiri oleh MEE sebagai peninjau (6+5+1) dan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara ASEAN dengan setiap mitra wicaranya (6+1); (4) pertemuan 1+1 dalam sidang tertutup yang direncanakan menyusul pertemuan 6+1 juga dapat dihadiri oleh Menlu ASEAN lainnya tetapi tidak semuanya; (5) selain PNG yang selalu hadir dalam AMM sebagai peninjau khusus, Menlu Kepulauan Solomon juga diundang untuk hadir sebagai peninjau; (6) pertemuan AMM ke-23 ini akan diawali dengan pertemuan para pejabat senior ASEAN (SOM) tanggal 20-22 Juli guna mempersiapkan materi pertemuan para Menlu (*Antara*, 21-7-1990).

Sementara itu PM Singapura Lee Kuan Yew, mengatakan kepada BBC di Singapura tanggal 21 Juli 1990 bahwa: (1) keputusan AS menarik dukungannya bagi CGDK di PBB mengundang teka-teki bagi Singapura; (2) kebijakan AS itu tidak dapat mencegah Khmer Merah meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran di Kamboja, tetapi bahkan membuatnya lebih bersemangat di medan pertempuran, sebab ia tidak mau dihabisi secara politis dan militer. Oleh karena itu Khmer Merah akan menyerukan suatu upaya militer untuk merebut wilayah Kamboja lebih banyak; (3) untuk mencegah Khmer Merah meraih kemenangan dibutuhkan lebih banyak lagi daripada hanya mengosongkan kursi Kamboja di PBB dan berunding dengan Vietnam yang menyangkut Kamboja; (4) langkah AS ini merupakan pre-seden yang berbahaya dalam menyatakan suatu negara anggota PBB yang bukan lagi anggota PBB; (5) jika dilakukan suatu penyelesaian melalui pemerintahan sementara PBB dan pemilihan umum, Khmer Merah dan Cina tetap merupakan suatu kelompok guna mencapai kesepakatan sebab bila tidak siapa yang akan dipilih sebagai wakil rakyat Kamboja (*Kompas*, 22-7-1990).

Pernyataan bersama para Menlu ASEAN tanggal 23 Juli 1990 di Hotel Hilton Jakarta, se usai *working dinner* menyebutkan antara lain: (1) ASEAN menentang gagasan untuk mengubah keanggotaan Kamboja di PBB,

sebelum *Supreme National Council* (SNC) terbentuk di Kamboja yang diterima baik oleh keempat faksi yang bertikai di Kamboja; (2) keanggotaan Kamboja di PBB adalah masalah politik yang peka dan upaya untuk mengubahnya pada saat ini sebelum SNC terbentuk akan merupakan kemunduran bagi upaya penyelesaian politik yang menyeluruh di Kamboja; (3) SNC seharusnya menduduki kursi Kamboja di PBB setelah badan itu terbentuk, dan sebaiknya beranggotakan pribadi dari pelbagai pandangan politik dan berwibawa di kalangan rakyat Kamboja; (4) SNC hendaknya sudah terbentuk pada saat Majelis Umum PBB bersidang; (5) ASEAN sepenuhnya mendukung peningkatan peranan PBB di Kamboja, antara lain sebagai pemerintahan sementara di Kamboja sebelum berlangsungnya pemilihan umum. Sedangkan SNC berperan sebagai administrator di Kamboja dalam masa peralihan melalui struktur pemerintahan yang ada bersama-sama dengan PBB; (6) perubahan sikap AS tentang masalah Kamboja akan mempersulit upaya ASEAN dalam mencari penyelesaian politik yang langgeng dan menyeluruh di Kamboja (*Kompas*, 24-7-1990).

Sementara itu anggota Komisi I DPR-RI Theo Sambuaga mengatakan kepada pers tanggal 21 Juli 1990 di Jakarta bahwa: (1) Indonesia dan ASEAN tidak perlu merasa dirugikan oleh perubahan sikap AS, karena justru memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk mendesak Khmer Merah dan RRC untuk bersikap lebih akomodatif terhadap rezim Hun Sen dalam perundingan-perundingan; (2) perubahan sikap AS memberikan dua dampak positif: (a) akan dapat mengurangi bargaining position Khmer Merah yang selama ini menjadi ganjalan dalam penyelesaian damai di Kamboja; (b) memungkinkan Vietnam mendesak Hun Sen untuk memberikan konsesi yang lebih lunak lagi; (3) Indonesia kini berpeluang besar untuk lebih aktif lagi melakukan pendekatan dan menempati posisi terdepan di ASEAN dalam menyelesaikan masalah Kamboja, karena mendapat kepercayaan dan mempunyai hubungan baik dengan Vietnam dan RRC; (4) Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk meningkatkan peranan ASEAN sebagai pengambil inisiatif dalam penyelesaian masalah Kamboja agar ASEAN tidak lepas dari konteksnya yang selama ini cukup berperan (*Merdeka*, 24-7-1990).

Presiden Soeharto mengatakan pada Pembukaan Sidang Tahunan Para Menlu ASEAN ke-23 tanggal 24 Juli 1990 di Istana Negara Jakarta bahwa: (1) sidang tingkat menteri ASEAN seperti sekarang ini tidak dapat lagi bersifat rutin sekedar menyibukkan diri meninjau

kegiatan serta hasil yang dicapai tahun yang lalu dan merencanakan program kerja untuk tahun berikutnya; (2) sidang tahunan ini agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk menilai dengan mengkaji ulang secara kritis dan menyeluruh posisi kepentingan dan tujuan pokok ASEAN dalam suatu lingkungan regional dan internasional yang sedang berubah dengan cepat dan terus berkembang; (3) ASEAN telah mampu menciptakan iklim serta kondisi regional yang memungkinkan negara anggotanya memusatkan perhatian dan usaha pembangunan nasional dan pada pemupukan ketahanan nasional serta regional melalui kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan; (4) ASEAN telah membuktikan dirinya berhasil hidup terus, bahkan tumbuh menjadi organisasi yang kukuh di mana keberadaan, potensi dan keberhasilannya tidak hanya diakui di kawasan Asia Timur, tetapi juga di seluruh dunia, namun hendaknya hal itu tidak boleh membuat ASEAN berpuas diri; (5) ASEAN akan ditantang untuk memperkuat jati dirinya serta tujuan dasarnya; (6) tugas utama ASEAN adalah terus meningkatkan kemampuan bersama agar dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru, serta mengantisipasi hambatan potensial yang terkandung dalam situasi yang sedang berkembang saat ini; (7) kecenderungan dewasa ini menghadapi ASEAN dan negara berkembang lainnya pada dilema yang sulit; (8) penggabungan sejumlah negara maju ke dalam kelompok kerjasama ekonomi yang kuat seperti Pasar Tunggal Eropa di satu pihak membuka peluang baru bagi ASEAN, tetapi di lain pihak dapat merugikan bila kelompok-kelompok itu menutup diri dan menegakkan rintangan baru terhadap dunia luar; (9) perkembangan di Eropa Timur dan Tengah ke arah pluralisme politik yang lebih besar dan sistem ekonomi pasar yang lebih terbuka mengandung aspek positif dan negatif karena ada kemungkinan beralihnya arus dana penanaman modal dan perdagangan dari negara-negara industri ke kawasan itu; (10) ASEAN sangat prihatin melihat berlanjutnya proteksionisme di negara-negara maju serta bergolakannya harga-harga di pasar komoditi internasional; (11) ASEAN tidak dapat menghindarkan diri dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh permasalahan hutang negara-negara berkembang yang terus membengkak dan diperburuk oleh berubah-ubahnya nilai tukar berbagai mata uang utama serta makin menyusutnya arus dana untuk pembangunan; (12) ASEAN harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang timbul dalam rangka menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya di tahun-tahun mendatang; (13) ASEAN hendaknya senantiasa berada di garis depan dalam usaha mempertahankan

suatu sistem perdagangan internasional yang benar-benar terbuka, adil dan dapat diandalkan; (14) ASEAN harus ikut menjamin agar Putaran Uruguay GATT yang sedang berlangsung sekarang ini diselesaikan dengan baik dan membuahkan hasil yang berimbang; (15) ASEAN harus berusaha menggairahkan kembali kerjasama di bidang komoditi demi terwujudnya pasaran yang lebih stabil dan harga yang layak bagi bahan mentah; (16) ASEAN agar secara aktif menyumbang pertumbuhan APEC, sehingga APEC dapat menjadi forum konsultasi dan kerjasama regional yang lebih luas di antara negara-negara Asia-Pasifik; (1) APEC harus berorientasi keluar dan menjadi wadah bagi kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip serta modalitas yang memperkuat ASEAN, bukan dilunturkan identitas dan persatuan serta kerjasama dengan negara lain; (18) apa yang dicapai dalam rangka kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN harus diakui masih di bawah harapan, meskipun ada kemajuan yang cukup menggembirakan terutama setelah KTT ASEAN III di Manila; (19) kini ASEAN seyogyanya mengadakan usaha-usaha yang lebih maju dan luas dalam rangka peningkatan bentuk kerjasama ekonomi yang sudah ada dan menajaki bentuk-bentuk kerjasama yang baru; (20) sudah saatnya ASEAN memikirkan langkah-langkah yang nyata guna memperkuat peranan dan fungsi Sekretariat ASEAN serta memperbaiki koordinasi antara berbagai komite ekonomi dan fungsional; (21) konflik Kamboja yang tak kunjung selesai masih tetap merupakan hambatan utama dalam usaha mencapai perdamaian dan stabilitas yang lebih mantap di kawasan ini; (22) selama lebih dari satu dasawarsa ASEAN selalu berupaya untuk memberikan sumbangannya bagi suatu penyelesaian yang menyeluruh, adil dan langgeng; (23) berbagai prakarsa telah dilancarkan untuk meneros kemacetan, namun patut disesalkan hingga kini belum membuahkan hasil, dikarenakan pihak-pihak dan negara-negara yang langsung terlibat belum menunjukkan kemauan politik untuk mencapai kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak; (24) pada akhirnya kemelut Kamboja yang berkepanjangan itu terpulang kepada pemimpin-pemimpin bangsa Kamboja sendiri; (25) kini tampak ada kemungkinan yang sangat mencekam bahwa kemacetan sekarang ini akan membuat upaya mencari penyelesaian politik kehilangan momentum dan akhirnya pudar; (26) ASEAN tetap terus berupaya memberi sumbangannya bagi pemulihan perdamaian yang adil di Kamboja (*Kompas*, 25-7-1990).

Sementara itu Menlu Ali Alatas mengatakan pada sidang pleno terbuka bahwa: (1) perubahan yang terus

berlanjut mengubah dasar ekonomi dan politik global; (2) model baru peredaan ketegangan dan akomodasi saling menguntungkan antara negara besar dan memberikan momentum serta membuka kemungkinan baru bagi kemajuan substansial dalam perlucutan senjata dan penyelesaian konflik regional; (3) perubahan yang terjadi cepat atau lambat akan berpengaruh di lingkungan ASEAN serta dalam bentuk dan cara yang berbeda mempengaruhi pula pada konfigurasi politik, ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Timur dan Pasifik; (4) ASEAN harus memiliki kapasitas yang dinamis untuk melindungi kesatuan dan mengatasi masalah bersama; (5) kecenderungan regionalisme di dunia saat ini menimbulkan *inward looking* dan eksklusivisme, dan ASEAN berkepentingan untuk menjamin agar kelompok ekonomi khususnya di negara industri dapat mempertahankan keterbukaan ekonomi dan sistem perdagangan multilateral; (6) ASEAN perlu aktif mengembangkan APEC menjadi forum *outward looking* berdasarkan interdependensi sejati dan saling menguntungkan serta diarahkan atas dasar prinsip dan tujuan ASEAN, sehingga dapat memperkuat daya kohesi dan tujuan fundamental ASEAN.

Pada saat yang sama, Menlu Singapura Wong Kan Seng mengatakan bahwa: (1) APEC hendaknya diarahkan agar menguntungkan ASEAN; (2) pada saat perkembangan di Eropa menjadi pusat perhatian dunia, APEC dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekstra bagi AS, Jepang dan negara besar lainnya untuk mempertahankan hubungannya dengan ASEAN; (3) ASEAN perlu memiliki pilihan arah baru baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menlu Malaysia Dato Abu Hassan Omar mengatakan bahwa: (1) Eropa Barat mitra dagang penting ASEAN mulai menaruh perhatian besar kepada negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur; (2) ASEAN harus mengambil langkah agar perkembangan di Eropa Timur tidak akan menurunkan keuntungan ekonomi ASEAN dalam hubungannya dengan Eropa Barat; (3) munculnya Pasar Tunggal Eropa dapat menciptakan *inward looking* di wilayah Eropa yang tidak akan memberikan kontribusi pada arus perdagangan bebas dan investasi dunia; (4) ASEAN perlu mengintensifkan dialog dengan mitra dari Eropa dan menekankan pentingnya ekspansi hubungan ekonomi.

Sedangkan Menlu Filipina Raul Manglapus mengatakan: (1) perkembangan di Eropa dan hubungan ekonomi AS-Kanada menjadi tantangan ASEAN; (2)

ASEAN perlu memperketat kerjasama ekonominya; (3) perkembangan di Eropa dan dunia saat ini merupakan kejadian dramatis yang perlu dijawab ASEAN (*Kompas*, 25-7-1990); (4) ASEAN perlu meningkatkan tekadnya untuk mewujudkan keamanan regional dalam kerangka kerjasama demi perdamaian kawasan ini; (5) lebih dari satu negara anggota ASEAN pada saat ini menampung berbagai fasilitas militer asing yang sifatnya sementara (*Angkatan Bersenjata*, 25-7-1990).

Komunike Bersama pada akhir sidang menyatakan bahwa: (1) persiapan KTT ASEAN mendatang untuk menentukan posisi dalam menghadapi perubahan cepat yang kini terjadi di seluruh dunia; (2) Sekretariat ASEAN agar mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan latihan tahunan yang menghasilkan *ASEAN Macroeconomic Outlook* (AMO) untuk bahan pertimbangan dalam pertemuan para menteri ASEAN; (3) penyelesaian krisis Kamboja hanya dapat dicapai melalui Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC) dan bukan dengan cara militer; (4) ASEAN menyambut baik perubahan mendasar dalam hubungan Timur-Barat yang telah menciptakan kondisi yang baik untuk mengupayakan perdamaian, keamanan dan kerjasama antar negara; (5) masalah keamanan Asia Tenggara memerlukan observasi yang sangat hati-hati, dan sepakat mengadakan dialog dalam konteks *Declaration of ASEAN Concord* serta Deklarasi Kuala Lumpur tentang ZOPFAN; (6) ASEAN harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengefektifkan pelaksanaan program Aksi ASEAN tentang ZOPFAN dan SEANWFZ yang disepakati dalam KTT ASEAN III; (7) ASEAN harus melanjutkan dan mengintensifkan upaya untuk menyusun draft perjanjian SEANWFZ, serta mempromosikan konsep ini pada negara-negara lain agar memperoleh dukungan; (8) ASEAN perlu mengambil langkah-langkah konkrit menuju kerjasama ekonomi intra ASEAN yang lebih efektif; (9) partisipasi swasta dalam proses dialog dan kerjasama intra ASEAN semakin penting dan dapat diefektifkan lagi; (10) sepakat melanjutkan inisiatif Ketua Panitia Tetap ASEAN untuk memperkuat peranan dan efektivitas mekanisme serta struktur ASEAN; (11) ASEAN menyambut baik bantuan yang disumbangkan oleh UNDP, ADB, Kanada dan MEE yang mendukung inisiatif Ketua Panitia Tetap; (12) mereka menyetujui pembentukan panel lima orang terkemuka yang disponsori UNDP untuk mengadakan studi dan membuat rekomendasi guna memperkuat dan mengubah struktur dan mekanisme ASEAN, khususnya Sekretariat ASEAN; (13) mendesak semua fraksi Kamboja mening-

katkan usaha untuk membentuk *Supreme National Council* (SNC) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki otoritas mewakili rakyat Kamboja dan dari semua pandangan politik; (14) SNC hendaknya merupakan badan yang mewakili keempat faksi Kamboja yang bersengketa, merdeka, berdaulat dan bersatu; (15) SNC diharapkan dapat dikukuhkan pada pertemuan Majelis Umum PBB ke-45 tahun 1990; (16) masalah wakil Kamboja di PBB merupakan masalah politik yang peka, karena itu usaha mengubah wakil Kamboja pada saat ini sebelum SNC terbentuk merupakan kemunduran dalam upaya mencari penyelesaian politik yang menyeluruh di Kamboja (*Kompas*, 26-7-1990).

Seusai penutupan, Menlu RI Ali Alatas mengatakan pada pers bahwa: (1) pengosongan kursi Kamboja di PBB bukan hal yang sederhana, karena selain ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, juga harus ada argumen yang dianggap benar dan diterima baik; (2) ASEAN tetap yakin jalan terbaik menyelesaikan konflik Kamboja adalah melalui jalur persidangan Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC); (3) ASEAN akan minta penjelasan dari Menlu AS, James Baker tentang kebijakan baru AS mengenai masalah Kamboja dalam forum 6 + 6 yaitu pertemuan meja bundar enam menlu ASEAN dan enam menlu mitra dialognya; (4) ASEAN menaruh perhatian yang mendalam mengenai meningkatnya orang perahu Kamboja dan Vietnam, untuk itu UNHCR agar mengambil langkah-langkah yang pasti untuk menghentikan manusia perahu yang membebani negara suaka di Asia Tenggara; (5) ASEAN tidak menyetujui dalih Vietnam tentang ketidakmampuan mencegah rakyatnya pergi secara sembunyi-sembunyi; (6) ASEAN menolak sikap menentang dari Vietnam dan AS mengenai pemulangan penungsi secara paksa karena hal ini terdapat dalam CPA (*Comprehensive Plan of Action*) (*Kompas*, 26-7-1990).

II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

A. PERKEMBANGAN EKONOMI ASEAN

Prof. Dr. Albert Coppe, Guru Besar Emeritus Universitas Katolik, Leuven, Belgia, mengatakan dalam pidato ilmiahnya yang berjudul "The European Economic and Political Integration and Its Impact on the International Community" pada Peringatan 30 Tahun Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, tanggal 1 Juni 1990, bahwa: (1) upaya integrasi Eropa Timur dan

Eropa Barat menjadi Eropa Raya akan memunculkan visi baru mengenai interaksi kegiatan ekonomi internasional yang akan dikenal sebagai *tripolar business world* (dunia usaha tiga kutub) yaitu Eropa Raya, Masyarakat ASEAN dan Amerika Utara; (2) jika masyarakat ASEAN benar-benar berkembang, dunia usaha tiga kutub akan merupakan kombinasi dari tiga pasar yang besar dan ramai; (3) ASEAN yang menitikberatkan kerjasama regional di bidang ekonomi menjanjikan suatu keseimbangan antara impor dan ekspor dalam hubungan ekonomi dengan kutub lain; (4) ASEAN memiliki banyak potensi dan merupakan pasar domestik yang besar; (5) ketiga kutub itu di masa depan diharapkan dapat berinteraksi secara seimbang dan saling menguntungkan di dunia perdagangan internasional (*Suara Karya*, 2-6-1990).

Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Sukamdani S. Gitosardjono, mengatakan kepada wartawan Suara Pembaruan di Jakarta tanggal 6 Juni 1990 bahwa: (1) Konsep Ekonomi Segi Tiga (KEST) dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi tekanan, terutama akibat perkembangan ekonomi global ke arah ASEAN Incorporated. Untuk itu dunia usaha Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang itu, dan jangan berpikir kerdil untuk sekedar menikmati pasaran lokal; (2) ide dasar untuk menciptakan KEST merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan kerjasama regional, tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi unsur sosial dan politik secara saling menguntungkan; (3) KEST merupakan dukungan positif bagi terciptanya hubungan kerjasama regional; (4) untuk menjalin hubungan di antara negara Indonesia, Malaysia dan Singapura agar saling menguntungkan dalam perdagangan global dunia perlu persiapan; (5) dengan dukungan Singapura, maka Indonesia dan Malaysia yang banyak memiliki kesamaan hasil hutan dan berbagai jenis komoditi tradisional lainnya, dapat saling mengatur strategi pemasaran bersama (*Suara Pembaruan*, 7-6-1990).

Sementara itu pengamat ekonomi Drs. Christianto Wibisono mengatakan bahwa: (1) terciptanya KEST dapat merupakan kekuatan ekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi dari Jepang dan AS sehingga menjadikan ASEAN Incorporated; (2) kerjasama tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan gambaran positif dan terobosan psikologis bagi Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada lagi anggapan bahwa Singapura lebih tinggi dibandingkan Indonesia atau Malaysia (*Suara Pembaruan*, 7-6-1990).

Biro Ekonomi Kemlu Jepang melaporkan bahwa meskipun ekspor Jepang ke Masyarakat Eropa, AS dan Kanada mengalami kemerosotan, tetapi ekspor Jepang ke Asia Tenggara naik 1,4% sehingga menjadi US\$6,99 milyar, sedangkan impor dari negara-negara Asia Tenggara US\$5,25 milyar lebih, naik 1,1%. Dengan ini Jepang surplus US\$1,73 milyar. Sementara ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang selama April 1990 naik 9,2% menjadi US\$2,18 milyar lebih sedangkan ekspor Jepang ke ASEAN naik 22,9% sehingga menjadi US\$2,51 milyar lebih (*Antara*, 11-7-1990).

B. KERJASAMA PERBANKAN

Konperensi Perbankan ASEAN ke-8 dan Pertemuan Dewan Perbankan ASEAN ke-20 berlangsung di Bali, tanggal 18-21 Juli 1990 dengan tema "Tantangan-tantangan yang Dihadapi oleh Perbankan ASEAN dalam Tahun 1990-an." Konperensi ini dihadiri oleh 170 peserta dari negara-negara anggota ASEAN untuk menggali ide-ide baru dalam rangka mencapai tujuan asosiasi. Hasil konperensi nanti akan disampaikan kepada Dewan untuk pembahasan lebih mendalam dan dicarikan implementasinya lebih lanjut.

Menteri Keuangan Prof. Dr. J.B. Sumarlin mengatakan pada pembukaan konperensi itu bahwa: (1) masalah pengaliran modal masuk ke kawasan ASEAN dan pertumbuhan mekanisme perdagangan internasional perlu dibahas bersama. Hal ini penting untuk menunjang serta menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi ASEAN; (2) pertumbuhan perdagangan internasional merupakan sarana penting untuk memperoleh valuta asing atau devisa guna mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN; (3) Indonesia dapat mengambil pengalaman dengan cara meningkatkan modal ke negara-negara ASEAN dan membantu bank-bank itu mengembangkan perdagangan luar negerinya, dan sebaliknya Indonesia dapat memberikan pengalaman kepada bank-bank di ASEAN mengenai mobilisasi dana; (4) munculnya kekuatan blok ekonomi dunia Barat, seperti perjanjian perdagangan bebas AS-Kanada serta terbentuknya Pasar Tunggal Eropa dapat mempengaruhi ekspor negara-negara ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 20-7-1990); (5) penyediaan modal merupakan sumber kehidupan untuk melanjutkan pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN; (6) sumber modal yang diperlukan dapat berasal dari tabungan pribadi yang dimobilisasikan oleh lembaga keuangan, tabungan masyarakat yang dimobilisasikan oleh pemerintah melalui pajak pe-

nerimaan, arus investasi luar negeri dalam sektor swasta, bantuan pembangunan pemerintah, pinjaman komersial dari luar negeri dan pasar modal; (7) perubahan sosial, politik dan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Eropa Timur, akan mempengaruhi situasi beberapa negara dan aktivitas bisnis satu negara dengan negara lainnya; (8) pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN sedang dalam kondisi top-form. ASEAN merupakan kawasan yang paling dinamis dan pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 8%/tahun, dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun ada kecenderungan untuk menurun, tetapi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN paling tidak akan mencapai 7,7%; (9) tantangan yang dihadapi oleh para perbankan ASEAN di tahun mendatang adalah masalah proteksionisme dan kemungkinan munculnya friksi di kalangan anggota ASEAN sendiri. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu terus dilanjutkan secara terbuka; (10) bank-bank yang ada di Indonesia diharuskan membiayai kegiatan ekspor non-migas dan khusus bank yang didirikan secara patungan dengan bank asing diwajibkan untuk mengalokasikan 50% dana kredit untuk membiayai ekspor non-migas; (11) masalah pinjaman bank-bank dari luar negeri tidak akan mempengaruhi sirkulasi uang di dalam negeri dan tingkat inflasi karena dana itu untuk membiayai kegiatan ekspor non-migas dan proyek yang berorientasi ekspor (*Suara Pembaruan*, 20-7-1990).

Sementara itu, pada forum diskusi, delegasi Singapura mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu mengatur kiat bersama menyambut modal dan teknologi yang sedang dialihkan dari Jepang dan negara-negara industri baru (NIC) ke negara-negara berkembang; (2) tahun 1989 negara-negara ASEAN memperoleh 52,3% dari US\$8,9 milyar investasi yang ditanam oleh kelima negara industri baru (NIC). Hal ini tentu akan lebih baik lagi, jika terjalin globalisasi aktivitas bersama antar negara ASEAN (*Kompas*, 21-7-1990).

Delegasi Filipina mengatakan bahwa: (1) langkah konkrit pembentukan kekuatan bersama ASEAN seharusnya bukan hanya globalisasi aktivitas bersama tetapi lebih tepat jika diciptakan formula investasi intra-regional untuk meraih investasi dari negara-negara industri baru (NIC); (2) empat bentuk kerjasama ASEAN, yaitu kesepakatan perdagangan preferensial, proyek industri, komplementasi industri dan kesepakatan industri patungan, belum menunjukkan integrasi ekonomi yang berarti; (3) seharusnya dalam formula in-

vestasi intra-regional, jaringan bank ASEAN memiliki sistem bersama yang saling mendukung, dan dapat segera dimanfaatkan dengan ditunjang oleh pembentukan area bebas perdagangan di kawasan ASEAN (*Kompas*, 21-7-1990).

Delegasi Indonesia mengatakan bahwa: (1) Indonesia tetap pada prinsip kebijakan deregulasi yang berporos pada keterbukaan ekonomi; (2) perubahan yang terjadi di Indonesia ialah peningkatan peran sektor swasta dalam aktivitas ekonomi; (3) keterbukaan Indonesia memungkinkan perbankan ASEAN berperan dalam berbagai sektor di Indonesia, misalnya kerjasama pelatihan karena perbankan Indonesia masih kekurangan tenaga manajer (*Kompas*, 21-7-1990).

Prof. Dr. Ronald I McKinnon dari Universitas Stanford, California, AS, mengatakan bahwa: (1) stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN harus dijaga dengan perimbangan kebebasan moneter dan perdagangan, sebab dalam penyediaan modal yang mutlak dibutuhkan dalam stabilitas ekonomi seringkali muncul bahaya yang tidak kelihatan sebelumnya. Misalnya, membentuk pasar modal, memang merupakan salah satu cara yang baik untuk memperoleh modal, tetapi kelimpahan modal yang diperoleh tidak produktif jika pasar modalnya kacau dan nilai tukar mata uang asing tidak dapat diduga; (2) jika mengalirnya dana pinjaman lewat sistem perbankan yang terorganisasi tidak dibarengi dengan imbalan keterbukaan perdagangan dapat mengakibatkan peminjam-peminjam yang potensial membentuk kekuatan pendanaan sendiri, yang akhirnya menimbulkan perbedaan antara peminjam yang diprioritaskan dan yang tidak diprioritaskan (*Kompas*, 21-7-1990).

Sementara itu, Dr. Sjahrij mengatakan bahwa salah satu contoh yang baik untuk dikaji adalah kebijaksanaan perbankan di Indonesia yang kini mampu menggerakkan kekuatan dan menumbuhkan ekonomi. Namun harus didukung dengan kebijaksanaan perdagangan yang memberi keleluasaan yang seimbang dengan kebijaksanaan perbankan. Paket deregulasi perdagangan bulan Mei 1990 cukup baik tetapi belum memadai jika dibandingkan dengan kebijaksanaan perbankan (*Kompas*, 21-7-1990).

Gubernur Bank Indonesia, Adrianus Mooy, mengatakan bahwa: (1) bank-bank yang tidak sehat harus segera merestrukturisasi dana dan jangan ragu-ragu meminta *discount window*; (2) bank-bank yang tidak sehat disebabkan terlalu bergantung pada pasar uang, pada-

hal pasar uang hanya merupakan salah satu sumber dana (*Suara Pembaruan*, 21-7-1990).

Ketua Federasi Perikanan ASEAN (AFF), J.A. Sumendap, mengatakan setelah pertemuan AFF dengan komite tetap keuangan, pertanian dan agro industri Dewan Perbankan ASEAN (ABC) di Bali tanggal 20 Juli 1990 bahwa: (1) sebuah perusahaan perikanan ASEAN (*ASEAN Fisheries Corporation*) akan dibangun di Indonesia; (2) proyek kerjasama perusahaan perikanan ASEAN dihasilkan berdasarkan sidang Dewan Federasi Perikanan ASEAN ke-1 di Bangkok, bulan Oktober 1989; (3) perusahaan perikanan ASEAN meliputi pabrik pemrosesan dan pengalengan, penyiapan ruang pendingin (*cold storage*) dan pabrik es; (4) sasaran perusahaan perikanan ASEAN adalah memberikan nilai tambah bagi hasil-hasil perikanan dan penyerapan tenaga kerja; (5) investasi perusahaan itu diperkirakan mencapai US\$20-30 juta, dan pemegang sahamnya adalah negara-negara ASEAN anggota federasi perikanan masing-masing negara; (6) selain perusahaan perikanan ASEAN, sedang direncanakan pembangunan *ASEAN Seafood Restaurant* di masing-masing negara ASEAN; (7) perusahaan perikanan ASEAN tidak akan tumpang-tindih dengan PT Industri Perikanan Nusantara yang didirikan di Indonesia oleh 37 perusahaan swasta (*Antara*, 21-7-1990).

Pada penutupan pertemuan mereka sepakat untuk meneruskan ASEAN Fund tahap kedua setelah ASEAN Fund tahap pertama berhasil mengumpulkan modal sekitar US\$212 juta.

Dalam jumpa pers sesuai penutupan konperensi, Ketua Dewan Perbankan ASEAN, H. Surasa, mengatakan bahwa: (1) sejak tahun 1988 ASEAN Fund tahap pertama memiliki modal sekitar US\$150 juta kemudian meningkat menjadi US\$212 juta; (2) peningkatan nilai sahamnya naik dari US\$10 menjadi sekitar US\$14,25 atau rata-rata meningkat 42%; (3) besarnya target modal untuk ASEAN Fund tahap kedua belum dapat ditetapkan; (4) *ASEAN venture capital* perlu didirikan sebagai lembaga keuangan yang diharapkan dapat membiayai perusahaan skala menengah dan pengusaha kecil di negara-negara anggota ASEAN; (5) dengan adanya ASEAN Fund dan modal usaha ASEAN memungkinkan peningkatan dana untuk investasi dalam negeri; (6) para bankir sepakat agar memantau perkembangan yang terjadi di negara-negara lain (*Antara*, 22-7-1990).

III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Persahabatan CAJ-NSK

Program Persahabatan Konfederasi Wartawan ASEAN dengan Nihon Shimbun Kyokai (Persatuan Editor dan Penerbit Surat Kabar Jepang) ke-13 berlangsung di Tokyo tanggal 7 Juni - 17 Juli 1990, diikuti oleh 15 wartawan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Muangthai untuk mempererat dan memperdalam hubungan persahabatan Jepang dengan negara-negara ASEAN.

Ketua Pusat Pers Asing (FPC) Jepang, Teruji Akiyama mengatakan penutupan program itu bahwa: (1) program persahabatan NSK-CAJ diharapkan dapat membantu memperdalam dan memperkokoh hubungan persahabatan Jepang-ASEAN; (2) sejak tahun 1978 lebih dari seratus wartawan ASEAN telah mengikuti program ini; (3) dalam program sekarang para peserta mempelajari perkembangan industri dan pola ketenagakerjaan di Jepang dan memperoleh penjelasan mengenai obyek-obyek industri yang dikunjungi serta bertukar pikiran dengan media massa dan industri setempat (*Antara*, 17-7-1990).

2. Kongres Pustakawan ASEAN ke-8

Kongres Pustakawan ASEAN ke-8 berlangsung di Jakarta tanggal 11-14 Juni 1990 dengan tema "Tantangan-tantangan Baru dalam Pelayanan Perpustakaan Negara-negara Berkembang," untuk memperoleh gambaran tentang masalah ketenagaan, peralatan dan sistem pelayanan perpustakaan di ASEAN. Kongres ini diikuti oleh 550 pustakawan Indonesia dan 114 pustakawan ASEAN lainnya, selain itu juga diikuti 32 pustakawan dari AS, Australia, Belanda, Inggris, Italia, Hongkong, Jepang dan Selandia Baru (*Antara*, 11-6-1990).

Presiden Soeharto mengatakan dalam pembukaan kongres itu bahwa: (1) peranan pustakawan dan perpustakaan penting bagi kemajuan masyarakat; (2) profesi pustakawan di Indonesia diakui secara resmi sejak tahun 1988 dan pengembangan karir para pustakawan terpulung pada mereka sendiri dalam memanfaatkan peluang tersebut; (3) berbeda dengan pertemuan ka-

langan profesi lainnya, pertemuan para pustakawan biasanya luput dari perhatian masyarakat umumnya dan media massa pada khususnya; (4) dalam proses pembangunan yang penting bukan hanya hasilnya yang bersifat kebendaan seperti tumbuhnya pabrik-pabrik atau bertambahnya jalan raya dan gedung-gedung megah, tetapi pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat menaikkan dan memperbaiki mutu kehidupan lahir batin bangsa secara menyeluruh; (5) pembangunan adalah proses yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial, spiritual, intelektual maupun profesional; (6) belum tentu semua yang berasal dari negara maju dapat diterapkan di negara-negara sedang membangun karena adanya perbedaan tingkat kemajuan ekonomi, sosial dan pendidikan; (7) bagi para pustakawan di negara-negara sedang membangun perlu mengkaji sistem dan jasa perpustakaan serta dokumentasi yang sesuai, karena hal ini penting guna menunjang pembangunan sosial ekonomi di negara mereka; (8) pengkajian penting dilakukan karena pustakawan merupakan motor penggerak perpustakaan, umumnya dididik di negara maju, atau mengenal metode-metode yang diterapkan di negara maju; (9) kemampuan membangun perpustakaan dan kebutuhan perpustakaan di negara maju berbeda dengan negara-negara yang sedang membangun; (10) Indonesia berusaha membangun perpustakaan sampai ke pelosok-pelosok tanah air karena menyadari pentingnya ilmu pengetahuan serta teknologi bagi pembangunan, tetapi karena keterbatasan kemampuan keuangan hasilnya masih jauh dari kebutuhan; (11) melalui perpustakaan masyarakat akan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Antara*, 11-6-1990).

B. KERJASAMA KESEHATAN

Konferensi Kesehatan ASEAN ke-1

Konferensi Kesehatan ASEAN ke-1 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 11-14 Juli 1990 diikuti oleh delegasi Dinas-dinas Kesehatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk: (1) merumuskan langkah-langkah pengawasan kesehatan dan mekanisme pengawasan penyakit trans-perbatasan; (2) bertukar informasi dan pengalaman serta berbagi pengetahuan teknis dan keahlian maupun teknologi di bidang kesehatan.

Menteri Kesehatan Malaysia Ng Cheng Kiat mengatakan pada pertemuan itu bahwa forum ini untuk meng-

koordinasi peraturan kesehatan internasional dan menyelaraskan pemberlakuan peraturan obat-obatan serta makanan antar negara anggotanya. Di samping itu juga untuk mengenali masalah umum kesehatan di perbatasan dan membahas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkannya (*Antara*, 10-7-1990).

C. KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP

Pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan Hidup ASEAN ke-3

Pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan Hidup ASEAN (AEGE) ke-3 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 13-14 Juni 1990, dihadiri Menteri Pembangunan Brunei Darussalam, Ismail Damit, Sekretaris Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, Celso Roque, Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Ahmad Mattar, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Emil Salim, Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Energi Muangthai, Prachuab Chaiyasan, untuk membahas masalah lingkungan hidup.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Law Hieng Ding, Menteri Sains, Teknologi dan Lingkungan Hidup Malaysia, Stephen Yong mengatakan bahwa: (1) para ahli lingkungan hidup ASEAN agar waspada terhadap investor yang tidak bertanggung jawab dan menciptakan polusi yang merusak keseimbangan lingkungan hidup di Asia Tenggara; (2) satu cara untuk mencegah polusi akibat pembuangan limbah adalah menciptakan lingkungan yang harmonis di lingkungan ini; (3) para ahli agar mencari kemungkinan bagi pelaksanaan proyek di bawah pengawasan program kerjasama Jepang-ASEAN, yang antara lain meliputi pembangunan teknologi lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (*Antara*, 14-6-1990).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Malaysia, Nordin Hassan mengatakan bahwa: (1) negara-negara ASEAN saat ini sedang memerangi polusi dan menentang praktek-praktek perdagangan yang tidak jujur atas nama lingkungan hidup; (2) para ahli sebaiknya menyadari adanya kecenderungan praktek-praktek perdagangan atas nama lingkungan hidup sehingga dapat mengatasi praktek perdagangan tersebut (*Antara*, 14-6-1990).

Mereka sepakat untuk: (1) memperluas kerjasama dan mengambil sikap bersama mengenai isu lingkung-

an hidup global; (2) negara-negara maju hendaknya mengalihkan teknologi dan dana bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi polusi; (3) merumuskan suatu strategi bagi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; (4) kerangka kerja bagi keharmonisan standar kualitas lingkungan hidup (*Antara*, 20-6-1990); (5) mengambil tindakan guna mengatasi berbagai masalah mengenai lingkungan; (6) menyertakan faktor-faktor lingkungan dalam perencanaan ekonomi dan berjanji menerima rencana pengelolaan dan pengembangan program kerjasama sumber daya alam; (7) pembagian kelompok kerja ASEAN yang meliputi: (a) konservasi alam oleh Malaysia; (b) lingkungan laut dan perairan oleh Brunei Darussalam; (c) pencemaran antar perbatasan oleh Singapura; (d) pengelolaan lingkungan oleh Filipina; (e) ekonomi lingkungan hidup oleh Indonesia; (f) informasi mengenai lingkungan melalui kesadaran masyarakat dan pendidikan oleh Muangthai (*Suara Pembaruan*, 20-6-1990); (8) membentuk strategi kelompok guna: (a) pengembangan yang menunjang program-program kebijaksanaan; (b) mengharmoniskan standar kesamaan lingkungan hidup; (c) mengkoordinasikan pencegahan polusi lintas perbatasan; (d) mengambil langkah-langkah yang mengurangi polusi; (e) melakukan riset dan pengembangan serta memajukan penggunaan teknologi bersih (*Merdeka*, 21-6-1990).

D. MASALAH KEAMANAN

Menteri Pertahanan Filipina, Fidel Ramos, mengatakan pada pembukaan Pekan Mesiu dan Pertahanan Filipina pertama di Manila tanggal 28 Juni 1990, bahwa: (1) negara-negara Asia Tenggara agar bersamasama membuat senjata dan mengubah kawasan Asia Tenggara menjadi suatu blok yang kuat untuk menangkal ancaman dari luar; (2) sangat tidak realistis dan berbahaya bagi suatu negara untuk mengandalkan belas kasihan negara lain dalam urusan pertahanan; (3) ASEAN sebaiknya membuat kebijakan-kebijakan yang membuka peluang bagi kelompok negaranya untuk menghasilkan dan menjual peralatan pertahanan dalam konteks saling melengkapi, kerjasama atau semangat berkompetisi; (4) Filipina jangan sampai tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya dalam usaha memproduksi perlengkapan militer; (5) Filipina dapat membantu kestabilan regional dengan meningkatkan kerjasama pertahanan, khususnya dalam konteks saling melengkapi di bawah payung ASEAN (*Media Indonesia*, 29-6-1990).

Staf Ahli Lemhannas Indonesia, Sudjai, mengatakan pada Kursus Diplomat-diplomat Muda ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 4 Juli 1990, bahwa: (1) ASEAN perlu meningkatkan kerjasama keamanan untuk menghadapi ancaman-ancaman di masa mendatang dengan prinsip tak ada pangkalan militer di kawasan Asia Tenggara; (2) ASEAN harus mewujudkan ZOPFAN dan zona bebas senjata nuklir; (3) ASEAN harus terus menjamin kebebasan dan keamanan pelayaran pada garis SLOC (*Sea Lines of Communication*); (4) perlu usaha bersama untuk mengatasi kelemahan di bidang kerjasama ekonomi; (5) kerjasama sosial budaya dalam arti hubungan sosial antara sesama warga ASEAN masih lemah (*Antara*, 5-7-1990).

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan kepada peserta "Indonesia Forum" yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta tanggal 11 Juli 1990 bahwa: (1) kehadiran AS penting bagi pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Oleh karena itu menjadi kepentingan ASEAN untuk mendorong agar AS tetap mempertahankan kehadirannya; (2) pengurangan kehadiran AS secara drastis dapat menimbulkan kekhawatiran karena negara-negara di kawasan Asia akan terpancing untuk meningkatkan kemampuan militernya; (3) Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad, tidak keberatan atas tawaran Singapura untuk menyediakan fasilitas bagi perbaikan pesawat dan kapal-kapal AS yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara (*Kompas*, 12-7-1990).

Panglima Komando Tertinggi Muangthai, Jenderal Sunthorn Kongsompong, mengatakan di Bangkok tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) sebaiknya ASEAN memiliki rasa percaya diri dan mengambil bagian dalam produksi senjata gabungan; (2) apabila ASEAN tidak dapat bergantung pada kekuatan bersama, akan muncul kekuatan baru yang mempengaruhi dan mendominasi ASEAN di masa-masa mendatang; (3) latihan gabungan militer yang hanya bersifat bilateral agar lebih ditingkatkan untuk memperkuat rasa percaya diri ASEAN (*Antara*, 20-7-1990).

IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA (PMC)

Post Ministerial Conference atau PMC berlangsung di Jakarta tanggal 27-29 Juli 1990 untuk membahas: (1)

kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (2) masalah Kamboja yang berkaitan dengan perubahan sikap AS; (3) masalah Putaran Uruguay (*Pelita*, 27-7-1990).

Dalam jamuan makan siang yang diselenggarakan *Indonesia Business Council* dan *Canada Business Association* di Jakarta tanggal 26 Juli 1990, Menlu Kanada Joe Clark mengatakan bahwa: (1) ASEAN harus meningkatkan dialog dengan negara-negara lain yang tidak termasuk dalam mitra dialognya, terutama dengan negara-negara yang mempunyai potensi di bidang keamanan dan kemakmuran di kawasan ini; (2) Kanada akan mendorong ASEAN untuk mengembangkan dialog di kawasan ini demi kemajuan ASEAN dan seluruh kawasan Asia-Pasifik; (3) ada tiga tahapan dialog dalam ASEAN yakni: (a) dialog tahunan para menlu ASEAN; (b) dialog para menlu ASEAN dengan mitra wicaranya; (c) dialog ASEAN dengan negara-negara yang tidak termasuk mitra wicaranya; (4) meskipun pertentangan ideologi sudah tidak menjadi sumber ketegangan antara Timur dan Barat, tetapi di kawasan Asia-Pasifik berbagai ideologi tetap hidup dan bersaing serta menjadi ancaman bagi keamanan regional bahkan global; (5) peredaan ketegangan secara otomatis tidak mengakhiri konflik regional dan negara-negara besar biasanya ikut berperan dalam konflik regional yang dapat merugikan kawasan; (6) perhatian Kanada di Pasifik bukan hanya dalam hal perdagangan dan investasi saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya (*Suara Pembaruan*, 27-7-1990).

Sedangkan Menlu Australia, Gareth Evans mengatakan pada pers di Jakarta tanggal 26 Juli 1990 bahwa: (1) meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi di Timor Timur, namun usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sangat membesarkan hati Australia; (2) Australia akan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam membangun dan meningkatkan kondisi hidup masyarakat Timor Timur, karena hal itu merupakan cara terbaik bagi negaranya untuk ikut membantu rakyat di propinsi itu; (3) Timor Timur membutuhkan bantuan untuk meningkatkan hasil pertanian, peternakan dan penambahan suplai air di pedesaan; (4) Australia akan menambah program bantuan bilateral jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan di Timor Timur sebesar US\$1,5 juta atau sekitar Rp2,1 milyar (*Kompas*, 27-7-1990).

Ketua Komite Tetap ASEAN, Ali Alatas mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) disparitas dan ketimpangan yang sangat tajam telah memperluas ketidakpastian ekonomi dunia serta mengakibatkan hu-

nggung antara negara maju dan negara berkembang semakin menyedihkan; (2) ASEAN prihatin terhadap dampak bertambahnya beban utang luar negeri negara-negara berkembang, yang diperburuk oleh fluktuasi kurs dan mengecilnya arus finansial untuk pembangunan; (3) pengaktifan kembali Dialog Utara-Selatan semakin diperlukan guna menanggapi berbagai masalah global dengan dasar saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya; (4) investasi dan perdagangan dari Barat kemungkinan akan beralih ke negara-negara Eropa Timur, setelah negara-negara sosialis tersebut mengubah sistem ekonomi mereka dari perencanaan ke arah ekonomi pasar; (5) upaya pencarian penyelesaian politik di Kamboja semakin mengendur, dan faksi-faksi yang bersengketa masih belum mampu membangun kemauan politik untuk mencapai suatu kompromi bahkan memperkeras sikap mereka masing-masing; (6) karena proses perundingan berada dalam tahap rawan, hendaknya pihak-pihak yang terlibat dapat menahan diri sehingga proses penyelesaian Kamboja tidak berlarut-larut (*Pelita*, 28-7-1990).

Sedangkan Menlu AS James Baker III mengatakan bahwa: (1) perubahan kebijaksanaan AS dalam masalah Kamboja adalah untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah; (2) kursi Kamboja di PBB adalah milik pemerintah yang dipilih rakyat Kamboja secara bebas, yaitu orang-orang Kamboja yang terikat untuk mengadakan pemilihan umum yang adil dan bebas dalam konteks suatu penyelesaian yang mencakup gencatan senjata serta penghentian kekerasan terhadap penduduk sipil; (3) jika disepakati mengenai tujuan penentuan nasib sendiri bangsa Kamboja, maka diperlukan dorongan kepada upaya kelima anggota tetap DK PBB untuk mendesak terbentuknya SNC dan penyelenggaraan pemilu yang diadakan PBB; (4) untuk mencapai penentuan nasib sendiri di Kamboja dan menghindari kebangkitan kembali militer Khmer Merah akan lebih baik jika dilakukan kerjasama karena peluangnya lebih besar; (5) AS sangat gembira karena kebijakan barunya sangat dekat dengan posisi bersama ASEAN seperti yang tercantum dalam pernyataan bersama para Menlu ASEAN tentang Kamboja tanggal 23 Juli 1990; (6) AS dan ASEAN mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya terdapat sedikit perbedaan tentang pendekatan yang ditempuh untuk mencapai tujuan (*Kompas*, 28-7-1990).

Menlu Selandia Baru Mike K. Moore mengatakan bahwa: (1) kini saatnya untuk membuat Cina dan Vietnam menyadari bahwa kesabaran masyarakat dunia

tentang Kamboja sudah mulai habis; (2) jika Cina dan Vietnam tidak ingin ditinggalkan oleh kekuatan dunia, maka mereka harus melaksanakan kewajibannya; (3) perubahan politik dan ekonomi yang sedang melanda dunia tidak mempengaruhi keadaan di Kamboja, meskipun banyak pihak telah berupaya membantu menyelesaikan konflik itu termasuk para pemimpin ASEAN; (4) Selandia Baru mendukung sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB (*Pelita*, 28-7-1990).

Sementara itu Menlu Australia, Gareth Evans mengatakan bahwa situasi penyelesaian Kamboja kini telah beralih dari banyak jalan pada tahun lalu menjadi satu jalan pada tahun ini. Sedangkan usaha untuk menyeberangi jalan itu adalah dengan pembentukan Dewan Nasional Tertinggi (SNC).

Sedangkan Menlu Jepang Taro Nakayama mengatakan bahwa hal yang terpenting bagi proses perdamaian di Kamboja saat ini adalah pembentukan SNC. Sebab dengan pembentukan SNC itu dapat dijadikan forum dialog bagi faksi-faksi Kamboja mengenai masalah-masalah penting yang harus diatasi bersama, misalnya struktur pemerintahan sementara, masalah yang berkaitan dengan kekuasaan militer di Kamboja dan sebagainya sehingga dapat tercapai perdamaian.

Di lain pihak Komisioner Masyarakat Eropa untuk hubungan Utara-Selatan Abel Matules mengatakan bahwa: (1) kecenderungan baru di bidang politik dan ekonomi di Eropa tidak akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi negara-negara di luar Eropa; (2) ASEAN dan negara-negara berkembang dapat memetik keuntungan dari akibat meluasnya kesempatan pasar di Eropa Timur; (3) ME sudah mengusulkan kepada semua anggotanya untuk menaikkan bantuan pembangunan kepada Asia dan Amerika Latin sebesar 82% dalam periode 1991-1995 (*Pelita*, 28-7-1990).

Sementara itu dalam sidang tanggal 28 Juli 1990, Menlu Filipina Raul Manglapus yang mewakili ASEAN mengatakan bahwa: (1) ASEAN meminta agar Jepang memperhatikan akses pasar produk-produk ASEAN ke pasar Jepang; (2) ASEAN mengharapkan agar Jepang cepat menangani ketidakseimbangan struktural dalam perdagangan kedua pihak dan masalah perdagangan lainnya dengan pertimbangan yang cermat dan serius.

Di lain pihak Menlu Jepang Taro Nakayama mengatakan bahwa: (1) kawasan ASEAN akan terus merupakan prioritas nomor satu bagi kerjasama ekonomi Jepang; (2) niat Jepang untuk meluaskan dukungan se-

pantasnya ke Eropa Timur untuk mendorong perubahan tidak akan mengurangi perhatian Jepang ke Asia khususnya ASEAN; (3) kerjasama dengan ASEAN penting untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi di kawasan Asia-Pasifik; (4) Jepang berniat untuk bekerjasama dengan ASEAN guna mencari penyelesaian secara dini seperti konflik Kamboja dan berbagai faktor destabilitor; (5) pada saat kritis seperti sekarang ini memperkuat hubungan dan persahabatan serta kerjasama antara Jepang dengan ASEAN menjadi lebih penting.

Sedangkan Menlu RI Ali Alatas yang memimpin dialog ASEAN-Selandia Baru mengatakan bahwa: (1) ASEAN meminta agar jumlah mahasiswa ASEAN yang belajar di negara itu bertambah terutama untuk kursus-kursus terbatas; (2) ASEAN mengharapkan agar hambatan-hambatan perdagangan dapat diselesaikan demi mempermudah produk-produk ASEAN masuk ke Pasar Selandia Baru; (3) ASEAN mengharapkan agar pengusaha swasta Selandia Baru menanam modalnya terutama investasi dalam *ASEAN Industrial Joint Venture Scheme*; (4) pertimbangan Selandia Baru mencabut izin masuk bebas bagi salah satu negara ASEAN dikawatirkan akan mengganggu kegiatan perdagangan dan menimbulkan dampak negatif lainnya dalam hubungan kedua negara, karena itu tidak perlu dilaksanakan.

Sedangkan Menlu Selandia Baru Mike K. Moore mengatakan bahwa: (1) untuk jangka lima tahun sampai periode 1991-1992 negaranya telah menyediakan US\$12 juta dengan fokus pada berbagai proyek yang berkaitan dengan berbagai lembaga dan proyek promosi perdagangan serta investasi; (2) Selandia Baru sudah memperoleh cara lain untuk membiayai mahasiswa ASEAN di Fakultas Perdagangan Universitas Victoria dengan cara membebaskan dana program ASEAN untuk kemungkinan proyek baru; (3) ekspor ASEAN ke Selandia Baru pada tahun 1989 meningkat 60% dan merupakan jumlah tertinggi dibanding dengan mitra dagang negara lainnya; (4) Selandia Baru akan mengurangi tarif masuk bagi barang negara-negara ASEAN sebesar 10% pada tahun 1996; (5) ASEAN agar mematuhi kesepakatan GATT seperti yang dilakukan negaranya; (6) Selandia Baru tetap akan memberikan bantuan bagi pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi khususnya dalam pengelolaan lingkungan (*Suara Pembaruan*, 30-7-1990).

Ketika menerima kunjungan kehormatan para Menlu ASEAN dan mitra dialognya di Istana Merdeka

Jakarta tanggal 28 Juli 1990, Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) ASEAN dan mitra dialognya telah bersama-sama mencoba mengerahkan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja secara menyeluruh, namun pada dasarnya penyelesaian itu terpulung pada rakyat Kamboja sendiri; (2) sumber permasalahan pengungsi adalah konflik Kamboja; (3) baik masalah Kamboja maupun pengungsi bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan posisi ASEAN dan mitra dialognya, tetapi justru untuk saling mengkoordinasikan gerak dan langkah; (4) ASEAN menganggap penting forum dialog semacam ini, karena bukan hanya bermanfaat bagi ASEAN saja tetapi juga bagi mitra dialognya; (5) perbedaan pendapat, pandangan dan persepsi dalam forum dialog adalah normal; (6) selama masih dapat berdialog, bertukar pikiran dan saling menjelaskan guna mencapai tujuan bersama yang lebih mendalam, hal ini akan tetap membawa kebersamaan guna menyumbangkan saham untuk mencapai tujuan bersama; (7) prinsip Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD '45 yakni ikut menciptakan dunia yang damai, bebas dan dilandasi keadilan sosial yang sekaligus juga merupakan tujuan bersama (*Suara Pembaruan*, 29-7-1990).

Sementara itu dalam pertemuan ASEAN-AS, Menlu AS James Baker mengatakan bahwa: (1) secara *Structural Impediment Initiative* (SII) AS-Jepang sangat penting, karena dapat terbukti secara integral bukan hanya untuk kemakmuran negaranya dan Jepang, tetapi juga bagi pertumbuhan kawasan secara keseluruhan; (2) AS percaya APEC dan ASEAN akan saling melengkapi baik di bidang telekomunikasi dan sumber daya manusia maupun di bidang promosi perdagangan, karena semua itu dapat membantu keterbatasan struktural guna mendorong pertumbuhan; (3) AS dan ASEAN sebaiknya meninjau ulang mekanisme konsultasi mereka sebagai tambahan Pertemuan Tahunan ASEAN-AS sekarang ini, karena hal ini sangat berguna dalam meningkatkan saling pengertian dan kerjasama; (4) ASEAN agar meningkatkan berbagai upaya untuk menangani bahaya narkotika yang saat ini makin meningkat; (5) volume perdagangan ASEAN-AS melebihi US\$30 juta per tahun, karena itu perlu dibentuk suatu mekanisme untuk mengatasi dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dagang (*Suara Pembaruan*, 30-7-1990).

B. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

Dalam seminar dengan judul "The Japan-US Relations in the Asia-Pacific Context" yang diselenggarakan

oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, tanggal 19 Juli 1990, Presiden Institut Masalah Internasional Jepang, Nobuo Matsunaga, mengatakan bahwa: (1) untuk menghadapi tantangan di masa mendatang akibat berbagai perubahan, dialog antara ASEAN, AS dan Jepang perlu terus dipertahankan; (2) negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dituntut kesiapan untuk melakukan penyesuaian dan menanggapi tuntutan-tuntutan baru akibat perubahan yang sudah dan akan terjadi; (3) Jepang dan ASEAN agar mendukung usaha AS untuk memenuhi komitmennya kepada Asia-Pasifik, dan memanfaatkan pertumbuhan dan dinamika ekonomi Asia-Pasifik; (4) Jepang telah bersedia untuk ikut membiayai pasukan AS yang ditempatkan di wilayah Jepang dan akan terus mempertahankan keamanan yang saling menguntungkan dalam kerjasama dengan AS; (5) perubahan yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur dapat menciptakan suatu tatanan global yang lebih konstruktif dan membawa kemakmuran umat manusia; (6) Jepang telah siap untuk memikul tanggung jawab atas kepemimpinan dunia; (7) AS tidak dapat meninggalkan atau mendelegasikan tanggung jawabnya dalam bidang keamanan dan politik, sedangkan Jepang dan sekutu AS lainnya hanya dapat melengkapi atau memperkuatnya; (8) Jepang siap untuk memberikan dukungan ekonomi bagi perkembangan dunia dan berperan aktif dalam rencana pembentukan suatu forum konsultasi dan kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik; (9) ada tiga faktor yang akan menentukan akibat perubahan-perubahan internasional terutama yang terjadi di Eropa terhadap kawasan Asia-Pasifik, yaitu: (a) bagaimana tanggapan AS terhadap perubahan-perubahan tersebut; (b) bagaimana Uni Soviet menemukan perannya di Asia-Pasifik; (c) bagaimana arah yang akan diambil RRC (*Suara Karya*, 21-7-1990).

C. HUBUNGAN ASEAN-UNI SOVIET

Wakil Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev, mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 8 Juni 1990 bahwa Uni Soviet: (1) ingin memperbarui dialog tahunannya dengan negara-negara ASEAN mengenai masalah politik dan ekonomi, karena negara-negara ASEAN selalu berhubungan dengan partner-partner dagang negara-negara maju; (2) ingin menjadi anggota forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC); (3) mengusulkan perundingan multilateral dengan AS dan negara-negara besar di Asia untuk mengurangi ketegangan dan pembangunan senjata di kawasan Asia-Pasifik; (4) telah menarik armada kapal induknya dan akan menarik 7

dari 9 kapalnya dari pangkalan AL di Teluk Cam Ranh, Vietnam (*Merdeka*, 9-6-1990).

D. HUBUNGAN ASEAN - ASIA-PASIFIK

- Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-2

Pertemuan kedua Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berlangsung di Singapura tanggal 30-31 Juli 1990, dihadiri oleh 23 menteri yang mewakili 12 negara ASEAN, AS, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang dan Australia untuk membahas proyek-proyek kerjasama di bidang data investasi dan perdagangan, peningkatan perdagangan, perluasan alih teknologi dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama energi, kerjasama sumber daya kelautan dan kerjasama telekomunikasi, masalah keanggotaan APEC, tinjauan ekonomi internasional dan regional serta pembebasan dagang global.

PM Singapura, Lee Kuan Yew mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) ASEAN mendukung APEC dengan jaminan bahwa APEC tidak akan menghapuskan identitas ASEAN; (2) tujuan ASEAN dan APEC yaitu untuk memajukan upaya pembebasan perdagangan dan peningkatan standar hidup masyarakat; (3) pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik rata-rata mencapai 4,2% per tahun sedangkan pertumbuhan ekonomi industri baru (NIE) 7,8%; (4) pertumbuhan perdagangan APEC selama tahun 1980-1988 mencapai 6,7% per tahun. Sementara pertumbuhan perdagangan dunia hanya mencapai 4,6% per tahun. Berarti pertumbuhan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik hampir dua kali lipat pertumbuhan negara-negara OECD; (5) pada tahun 1980 perdagangan antara negara-negara APEC meningkat sebesar 50% sedangkan pada tahun 1990 sebesar 55%; (6) pada tahun 1980 pertukaran perdagangan hanya berupa bahan-bahan mentah dan energi untuk pabrik-pabrik tetapi sekarang pertukaran perdagangan berupa barang-barang yang sudah diproses dan barang-barang pabrik; (7) pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya standar hidup masyarakat di kawasan Asia-Pasifik merupakan hasil kebijakan yang berorientasi ekspor dengan dasar pasar bebas; (8) pertemuan APEC kedua telah memberikan kesempatan mengenai cara kerja APEC di masa depan dan APEC dapat menjadi sebuah forum yang mewadahi pertukaran pandangan dan membahas masalah ekonomi yang menjadi kepentingan bersama; (9) APEC perlu memusatkan perhatian kepada perubahan pola-pola perdagangan yang timbul

akibat perkembangan ekonomi dan teknologi; (10) di bidang perdagangan negara APEC yang mencatat sepertiga dari seluruh perdagangan dunia berkepentingan menuntaskan pembicaraan dagang Babak Uruguay yang akan berakhir pada bulan Desember 1990 (Antara, 30-7-1990); (11) APEC hanya dapat berjalan bila ada keamanan dan stabilitas di dunia; (12) APEC akan memberikan sumbangan yang berarti bagi tercapainya dunia yang stabil dan lebih baik (*Suara Pembaruan*, 30-7-1990).

Menlu AS, James Baker III, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) AS mengusulkan agar masalah transportasi dimasukkan dalam program APEC; (2) AS menginginkan agar APEC memberikan komitmen yang kuat bagi keberhasilan perundingan perdagangan multilateral Babak Uruguay dan pembahasan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik secara global; (3) tugas APEC dalam mengurangi hambatan pertumbuhan akan menjadi katalis bagi perluasan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik dan ekonomi dunia; (4) AS akan tetap mempertahankan kemitraannya dengan negara di kawasan Asia-Pasifik dan AS menganggap ASEAN sebagai lembaga politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dapat melanjutkan tugas bersama dalam APEC; (5) negara-negara industri tetap akan terus memberikan landasan yang kuat bagi perluasan negara berkembang, pada saat pertumbuhan perdagangan dunia masih menguat (*Antara*, 30-7-1990).

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) Jepang setuju RRC, Taiwan dan Hongkong masuk dalam APEC; (2) APEC akan berperan lebih penting sebagai wadah tukar pengalaman dan pandangan serta dalam melaksanakan proyek kerjasama di berbagai bidang; (3) APEC akan menjadi model kerjasama regional yang terbuka bagi dunia (*Antara*, 30-7-1990).

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, B.G. Lee Hsien Loong, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) APEC terikat pada prinsip perdagangan bebas dan akan tetap mempertahankan kebijakan dagang liberal; (2) APEC akan membantu keberhasilan perundingan perdagangan multilateral Babak Uruguay yang akan berakhir pada bulan Desember 1990; (3) pertemuan menteri-menteri perdagangan di Vancouver, Kanada, bulan September 1990 mendatang akan memberikan sumbangan bagi berhasilnya perundingan Babak Uruguay (*Antara*, 30-7-1990).

Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, sebagai Ketua Komite Tetap ASEAN mengatakan di Singapura tang-

gal 30 Juli 1990 bahwa: (1) bagi ASEAN masih terlalu dini untuk membahas masalah keanggotaan APEC karena APEC baru berfungsi sebagai forum konsultasi; (2) masalah keanggotaan APEC memerlukan waktu dan pertimbangan yang cukup lama; (3) ASEAN tidak ingin membentuk blok perdagangan karena ASEAN mendukung pasar yang jujur dan bebas (*Antara*, 31-7-1990).

Menteri Perindustrian dan Sumber Primer Brunei Darussalam, Abdul Rahman Taib, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) prinsip ASEAN dalam kerjasama APEC adalah mempertahankan kohesi dan identitas ASEAN serta kerjasama regional agar tidak menimbulkan pembentukan blok perdagangan; (2) APEC seharusnya memusatkan perhatian pada masalah investasi, pembebasan dagang, alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia; (3) APEC seharusnya berfungsi sebagai alat mencapai suatu tujuan guna mengurangi ketegangan ekonomi dan perdagangan (*Antara*, 31-7-1990).

Menlu Kanada, Joe Clark, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) ia setuju RRC, Taiwan dan Hongkong masuk dalam APEC; (2) pusat kegiatan ekonomi global kini beralih ke Pasifik, dan hal ini menguntungkan Kanada sebagai bangsa pedagang (*Antara*, 31-7-1990).

Menlu Ali Alatas, mengatakan di Singapura tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) dalam persidangan ASEAN memberikan sikap tegas terhadap negara-negara maju; (2) ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya mengecam sikap negara-negara maju yang tidak mematuhi prinsip-prinsip perdagangan yang jujur dan terbuka; (3) ASEAN berharap negara-negara maju dapat berperan lebih banyak misalnya dalam hal pembukaan akses pasar dan perdagangan; (4) ASEAN menganggap forum APEC sebagai forum peninjauan (*Antara*, 31-7-1990).

Menteri Perdagangan, Arifin Siregar, mengatakan di Singapura tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) jika negara maju terus menuntut untuk minta konsesi sebagai balasan terhadap permintaan negara berkembang maka perundingan pembebasan dagang tidak akan mengalami kemajuan; (2) jika perundingan Babak Uruguay gagal maka negara maju akan bersikap seenaknya terhadap negara berkembang, misalnya ketika tekstil Indonesia di embargo negara-negara maju; (3) negara-negara maju lebih memusatkan pada bidang-bidang perdagangan jasa dan bidang-bidang perdagangan uang tidak banyak melibatkan negara berkembang (*Antara*, 31-7-1990).

Deklarasi Para Menteri APEC mengatakan bahwa: (1) keberhasilan Babak Uruguay 1990 merupakan kesimpulan paling penting dalam agenda internasional; (2) para menteri APEC khawatir apabila dalam perundingan Babak Uruguay 1990 tidak ada kemajuan; (3) bidang-bidang pertanian, tekstil dan bahan jadi, bidang jasa serta setiap kelompok akses pasar sangat mendesak untuk diselesaikan dalam Babak Uruguay 1990; (4) peraturan-peraturan dagang dalam Babak Uruguay harus meningkatkan kompetisi yang jujur dan terbuka. Mereka sepakat tentang pentingnya memperkuat sistem perdagangan antar bangsa; (5) masalah yang penting adalah tentang sistem pemecahan GATT yang lebih efektif; (6) para menteri perdagangan APEC sepakat untuk mengadakan perundingan setelah Babak Uruguay bulan Desember 1990 selesai, guna menilai hasil-hasil perundingan (*Antara*, 31-7-1990).

Sehubungan dengan Babak Uruguay, ASEAN menyatakan bahwa: (1) ASEAN kecewa tentang pertemuan Komite Perundingan Perdagangan bulan April 1990 yang tidak ada kelanjutannya; (2) tidak ada kesesuaian antara negara berkembang dengan negara maju tentang sistem perdagangan bebas, masalah tarif dan non-tarif serta masalah produk-produk tropis; (3) ASEAN mengusulkan tentang pengurangan tarif; (4) ASEAN kecewa atas tindakan AS dan Kanada yang menggantung kuota global di bidang tekstil; (5) tidak ada kemajuan di bidang pertanian; (6) ASEAN kecewa dengan tindakan anti dumping; (7) negara maju agar memimpin upaya perundingan tentang akses pasar (*Antara*, 31-7-1990).

APEC sepakat untuk: (1) peningkatan modal dan penanaman modal asing (PMA) di kawasan Asia-Pasifik; (2) memperbaiki akses ekonomi di kawasan Asia-Pasifik guna mencapai alih teknologi yang produktif; (3) menjembatani disparitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; (4) mendukung pembentukan Pasar Tunggal Eropa 1992 guna menumbuhkan ekonomi yang berorientasi ke luar dan tidak akan menjadi blok perdagangan yang sempit; (5) pengesahan proyek-proyek sebagai berikut: (a) pengkajian data investasi dan perdagangan; (b) peningkatan perdagangan; (c) perluasan investasi dan alih teknologi; (d) pengembangan sumber daya manusia; (e) kerjasama energi; (f) konservasi sumber daya laut dan telekomunikasi; (6) menjamin keberhasilan Babak Uruguay dalam rangka GATT yang akan selesai pada bulan Desember 1990; (7) pertemuan berikutnya bahwa GATT tetap menjadi tema sentral, setelah Babak Uruguay 1990 selesai (*Antara*, 1-8-1990).

Menlu Ali Alatas, mengatakan pada jumpa pers tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) apabila perundingan Babak Uruguay 1990 gagal maka akan berakibat negatif bagi negara-negara berkembang; (2) ASEAN perlu melihat hasil positif dari perundingan Babak Uruguay; (3) meskipun ada tekanan dari negara-negara maju terhadap ASEAN, pertemuan APEC berjalan lancar; (4) ASEAN setuju RRC, Taiwan dan Hongkong-masuk dalam APEC hanya perlu kesepakatan dari ketiga negara yang bersangkutan dan di antara anggota APEC (*Antara*, 1-8-1990); (5) APEC bukan merupakan forum negosiasi seperti GATT; (6) masalah utama yang harus diselesaikan adalah akses pasar bagi negara-negara ASEAN; (7) APEC bukan blok dan tidak akan menjadi blok (*Kompas*, 1-8-1990).

Direktur Eksekutif CSIS, Hadi Soesastro mengatakan di Jakarta tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) apabila Babak Uruguay gagal maka negara-negara Asia-Pasifik sebaiknya menyelenggarakan Babak Pasifik; (2) ia memperkirakan bahwa Babak Uruguay tidak akan mencapai sasaran karena pada saat pembentukannya pihak-pihak yang terlibat tidak tahu tentang sistem perdagangan apa yang akan dilakukan; (3) GATT hanya merupakan badan konsultasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila suatu negara melanggar suatu kesepakatan, maka GATT hanya bisa memberi informasi; (4) apabila Babak Pasifik terbentuk maka harus mempunyai landasan non-diskriminasi. Babak Pasifik bukan untuk membentuk blok perdagangan; (5) forum APEC telah menunjukkan tanda-tanda ke arah kelembagaan, yaitu adanya kesepakatan mengenai pertemuan-pertemuan APEC di masa yang akan datang (*Antara*, 1-8-1990).

V. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- MASALAH SIKAP AS TENTANG KAMBOJA

Keputusan AS untuk menarik pengakuan CGDK di PBB yang dikemukakan oleh Menlu AS, James Baker III di Paris tanggal 18 Juli 1990 mengundang beberapa tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra.

Pada kesempatan itu, Menlu James Baker III mengatakan bahwa AS: (1) tidak mengakui lagi kursi CGDK di PBB. Perubahan sikap itu untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah di Kamboja. Tetapi pemerintahnya tetap melanjutkan dukungannya pada kelompok Sihanouk dan Son Sann; (2) akan membuka

dialog dengan Vietnam mengenai masalah Kamboja (*Kompas*, 19-7-1990).

Penasihat PM Muangthai, Kraisk Choonhavan, mengatakan di Bangkok tanggal 18 Juli 1990 bahwa: (1) pemerintahnya menyambut baik sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) sikap AS itu merupakan suatu kemajuan yang berarti dan mencerminkan pandangan AS tentang situasi Kamboja saat ini; (3) Muangthai tetap akan mengimbangi peranannya di antara faksi-faksi CGDK dan mempertimbangkan posisi ASEAN terhadap masalah Kamboja; (4) sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB mempunyai pengaruh kuat terhadap posisi ASEAN (*Antara*, 20-7-1990).

Menlu Ali Alatas, mengatakan di Jakarta tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) ia meragukan sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB akan menyelesaikan secara menyeluruh politik di Kamboja; (2) isu tentang sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB akan dibahas dalam Pertemuan Menlu ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting* = AMM) di Jakarta tanggal 24-26 Juli 1990; (3) AMC akan membahas masalah ekonomi, manusia perahu Indocina dan masalah Kamboja; (4) Indonesia dan ASEAN tidak keberatan tentang rencana AS untuk membuka dialog dengan Vietnam dan rezim Hun Sen di Phnom Penh (*Antara*, 20 Juli 1990).

Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, mengatakan di Hanoi tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Vietnam menyambut baik tawaran AS untuk membuka perundingan langsung tentang masalah Kamboja; (2) Vietnam siap berunding dengan negara-negara yang berkepentingan tentang masalah Kamboja; (3) Vietnam mengharapkan masalah Kamboja diselesaikan secara politis, adil dan masuk akal (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara Kemlu Kamboja, Chum Bun Rong, mengatakan di Kamboja tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Kamboja menyambut baik sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) keputusan AS tersebut merupakan langkah konstruktif menuju perdamaian di Kamboja (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara Kemlu Perancis, Daniel Bernard, mengatakan di Paris tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) perubahan AS tentang CGDK merupakan elemen positif yang akan membantu terciptanya perdamaian di Kamboja; (2) MEE akan membicarakan perubahan sikap AS tentang CGDK di Brussel tanggal 20 Juli 1990 (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara pemerintahan Thailand, Suvit Yodmanee, mengatakan di Bangkok tanggal 19 Juli 1990

bahwa: (1) perubahan sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB bukan merupakan suatu kejutan karena sejak dahulu opini negara-negara di dunia tidak setuju Khmer Merah sebagai salah satu faksi dalam CGDK; (2) rincian perubahan sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB belum jelas (*Kompas*, 20-7-1990).

PM Jepang, Toshiki Kaifu, mengatakan di Tokyo tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Jepang menyambut baik sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) perubahan sikap AS tersebut tidak akan mempengaruhi posisi Jepang yang tetap mengakui CGDK (*Kompas*, 20-7-1990).

Deputy Menlu Soviet, Igor Rogachev, mengatakan di Paris tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Soviet menyambut baik tentang perubahan sikap AS tersebut dan keputusan AS untuk berunding dengan Vietnam; (2) stabilitas di Asia Tenggara tidak mungkin tercapai tanpa normalisasi hubungan AS, Vietnam dan Kamboja (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara Kemlu Cina, Jin Guihua, mengatakan di Beijing tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Cina akan mempelajari tentang sikap AS tersebut, di samping menegaskan akan terus memberikan dukungan senjata kepada gerilyawan CGDK sebelum perdamaian tercapai; (2) CGDK harus tetap sebagai wakil resmi Kamboja di PBB; (3) kursi Kamboja di PBB tidak boleh dibiarkan kosong sebelum penyelesaian politik secara menyeluruh tercapai; (4) Cina akan terus mensuplai senjata untuk Khmer Merah; (5) selama Vietnam tidak menarik seluruh pasukannya dari Kamboja, Cina akan terus mendukung rakyat Kamboja dan perlawanannya terhadap invasi kekuatan asing (*Kompas*, 20-7-1990).

Pangeran Sihanouk mengatakan di Phnom Penh tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) ia mengecam sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) keputusan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak adil; (3) ia mendesak negara-negara di dunia agar tidak tinggal diam jika PBB mengosongkan kursi Kamboja (*Kompas*, 20-7-1990).

Pemimpin KPNLF, Son Sann, mengatakan di Phnom Penh tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) keputusan AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB adalah merupakan hal yang tidak pantas; (2) jika AS membantu Vietnam, hal ini akan memperpanjang peperangan dan memperburuk situasi di Kamboja; (3) dunia internasional harus terus mendukung perang rakyat Kamboja terhadap Vietnam (*Kompas*, 20-7-1990).

Anggota Komisi I DPR, Theo Sambuaga, mengatakan di Jakarta tanggal 21 Juli 1990 bahwa: (1) ASEAN

perlu memanfaatkan momentum perubahan sikap AS terhadap CGDK dan Vietnam dengan mengkaji ulang arah kebijaksanaan ASEAN dalam penyelesaian masalah Kamboja; (2) perubahan AS terhadap kelompok CGDK di PBB tidak merugikan negara-negara ASEAN bahkan memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk mendesak kelompok Khmer Merah dan pendukungnya RRC agar bersikap lebih akomodatif terhadap rezim Hun Sen dalam perundingan-perundingan selanjutnya; (3) perubahan sikap AS tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan peranan ASEAN dalam penyelesaian masalah Kamboja; (4) ASEAN tidak perlu menarik dukungannya terhadap CGDK karena ASEAN memiliki kepentingan dan visi yang berbeda dengan AS; (5) perubahan sikap AS terhadap CGDK dan Vietnam disebabkan karena tekanan politik dalam negeri AS yang menginginkan agar AS lebih bersikap realistis dalam menangani masalah Indocina (*Antara*, 22-7-1990).

Mantan Dubes RI untuk AS, Letjen (Purn.) Hasnan Habib, mengatakan pada wartawan Media Indonesia di Jakarta tanggal 26 Juli 1990 bahwa: (1) perubahan sikap AS tersebut mencerminkan sikap AS semakin realistis terhadap perkembangan di Kamboja dan membuka perspektif baru bagi penyelesaian konflik di Kamboja; (2) dialog dengan Vietnam bagi AS merupakan kunci penyelesaian masalah Kamboja; (3) ASEAN tidak pernah berhasil menyelesaikan konflik Kamboja selama sepuluh tahun terakhir ini (*Media Indonesia*, 27-7-1990).

Dekan FISIP-UI, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, mengatakan pada wartawan Media Indonesia di Jakarta tanggal 26 Juli 1990 bahwa: (1) ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan sikap AS terhadap CGDK, yaitu: (a) tekanan politik dalam negeri AS yang menginginkan perubahan kebijaksanaan terhadap konflik di Kamboja; (b) setelah melihat perkembangan di Kamboja, AS mulai menganut politik lepas tangan; (2) bagi AS mendukung CGDK sangat tidak menguntungkan, terutama dari sisi pertimbangan hak asasi manusia; (3) ASEAN mengkhawatirkan perkembangan Khmer Merah yang akan dapat memenangkan perjuangannya sehingga dapat menggulingkan pemerintahan Hun Sen; (4) penyelesaian konflik di Kamboja sangat ditentukan oleh kemauan politik Vietnam dan Cina bukan pada ASEAN; (5) yang mendesak bagi ASEAN adalah segera dikeluarkannya joint appeal kepada RRC dan Vietnam agar memaksa kelompok-kelompok yang mereka dukung melakukan gencatan senjata di Kamboja (*Media Indonesia*, 27-7-1990).

Para Penulis

- **BANDORO, Bantarto,**
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **LUHULIMA, C.P.F.,**
Berijazah Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, tahun 1957. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muenster, Westf dan berhasil meraih gelar Magister Artium (MA) dan Philosophy Doctor (Ph.D.) dalam bidang filsafat. Sejak Juli 1964 menjadi Staf Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Puslitbangpolwil-LIPI (sebelumnya bernama Lembaga Riset dan Kebudayaan Nasional LIPI/LRKN-LIPI). Tahun 1971-1980 menduduki jabatan Sekretaris LRKN-LIPI; kemudian tahun 1980-1984 sebagai Direktur bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Sekretariat Nasional ASEAN. Kini sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbangpolwil-LIPI, pengamat dan peneliti kawasan Euro-Amerika.
- **MANGKUSUWONDO, Suhadi,**
Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1957); Post graduate course, MIT Cambridge, Amerika Serikat (1959); Gelar Ph.D. dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1967). Jabatan sekarang Guru Besar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UI; jabatan sebelumnya antara lain, Direktur Jenderal Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan (1973-1975) dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- **SOESASTRO, Hadi,**
Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rhenish Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D. dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981 sampai sekarang), Dosen FISIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- **SUDARSONO, Juwono,**
Sarjana Publisistik, Universitas Indonesia (1965), MA dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1971) dan Ph.D. dalam Hubungan Internasional, London School of Economics and Political Science, Universitas London (1978). Kini sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional serta Dekan FISIP Universitas Indonesia dan pengajar pada Program Pasca Sarjana di Fakultas dan Universitas yang sama; sebelumnya adalah Ketua Departemen Ilmu Politik, FIS-UI (1971-1975) dan staf ahli Lembaga Studi Strategis, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1972-1975).
- **SUKMA, Rizal,**
Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (1989); sejak Juni 1990, Staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah RRC dan Asia Timur.

